



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada triwulan pertama 2020 BBPP Binuang menyadari suatu pandemi corona yang menyebar di mulai dari Tiongkok hingga ke pelosok daerah beserta ancaman kesehatan di sekitar persebarannya. Pada waktu bersamaan BBPP Binuang juga menyadari arah pandemi tersebut ke depannya merupakan suatu tantangan di sektor pertanian, untuk tetap berupaya meningkatkan kapasitas SDM pertanian agar senantiasa produktif dalam menyediakan dan menjaga ketersediaan pangan bagi kebutuhan daerah hingga nasional. Dampak pandemi tersebut terhadap sektor pertanian sangat terasa dalam upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian baik bagi aparatur maupun bagi non aparatur pertanian. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan sistem pendidikan dan pelatihan, bahkan merubah pola interkasi serta intensitas pelatihan dari komunikasi hingga tatap muka di lingkup sektor pertanian.

Meski demikian Mandat Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, tetap konsisten dan berupaya secara maksimal ditengan keterbatasan akibat pandemi, untuk melaksanakan tugas-tugas peningkatan kapasitas SDM pertanian baik bagi aparatur maupun bagi non aparatur pertanian melalui pendidikan dan pelatihan. Aparatur pertanian adalah profesi ASN di sektor pertanian dengan perjanjian kerja, dan bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan non aparatur pertanian (petani/pekebun/peternak) adalah perorangan WNI beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian.

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatan yang dipangku, berdasarkan Permentan Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011, yaitu Pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan bagi aparatur meliputi pelatihan fungsional, pelatihan teknis pertanian, dan pelatihan kewirusahaan, sedangkan pelatihan bagi

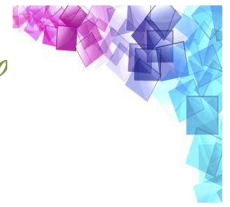


non aparatur meliputi Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta pelatihan teknis komoditas pertanian.

Meski demikian Dalam menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2019, BBPP Binnuang telah menumbuh kembangkan 143 (seratus empat puluh tiga) unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan (Kalimantan selatan, Kalima20ntan barat, Kalimantan utara, Kalimantan tengah dan Kalimantan timur). Di triwulan I tahun 2020 jumlah P4S sebanyak 176 atau terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah 33 lembaga.

Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Pelatihan teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.

Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan pelatihannya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa pelatihan), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda pelatihan, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikiya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melingkage dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.



B. Kondisi Umum BBPP Binuang

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Permentan Nomor 106/ Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, mempunyai Tugas Pokok **“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”**.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama.
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian.
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian.
- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian.
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian.
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik



pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.

- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis.
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Binuang.
- s) Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

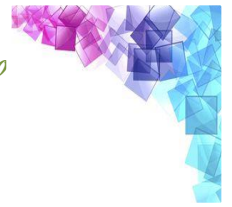
2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Organisasi dan Tata Kerja

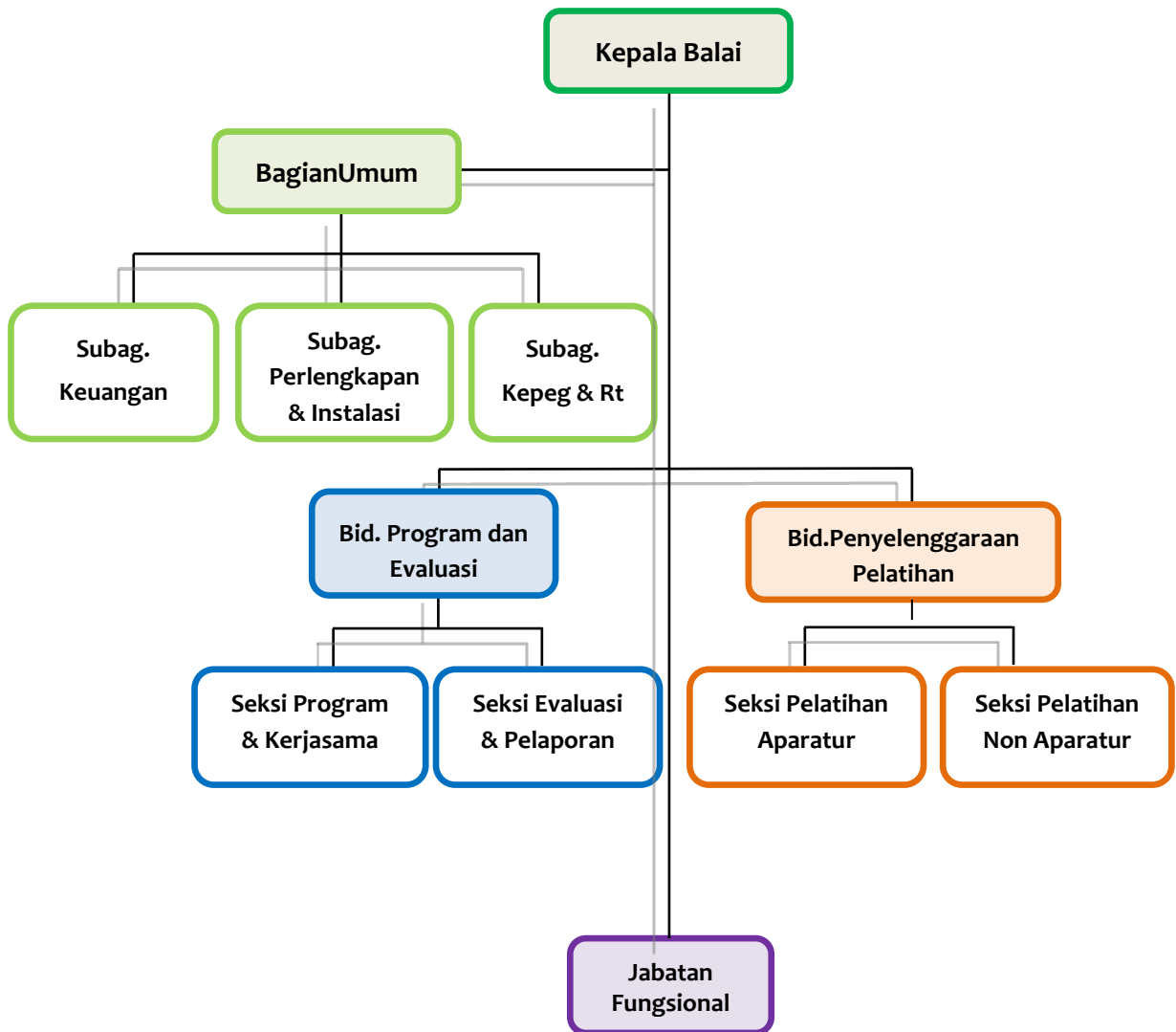
BBPP Binuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja eselon II-b. yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Eselon III-b dan Eselon IV-a terdiri dari :

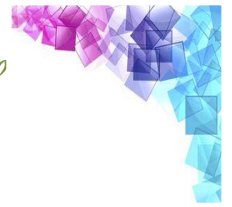
- a) Eselon III Kepala Bagian Umum membawahi tiga eselon IV, masing-masingnya :
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
- b) Eselon III Kepala Bidang Program membawahi dua Eselon IV, masing-masing :
 - Kepala Seksi Program dan Kerjasama
 - Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan
- c) Eselon III Kepala Bidang Penyelenggaraan membawahi dua Eselon IV, masing-masing :
 - Kepala Seksi Aparatur
 - Kepala Seksi Non Aparatur



b. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang

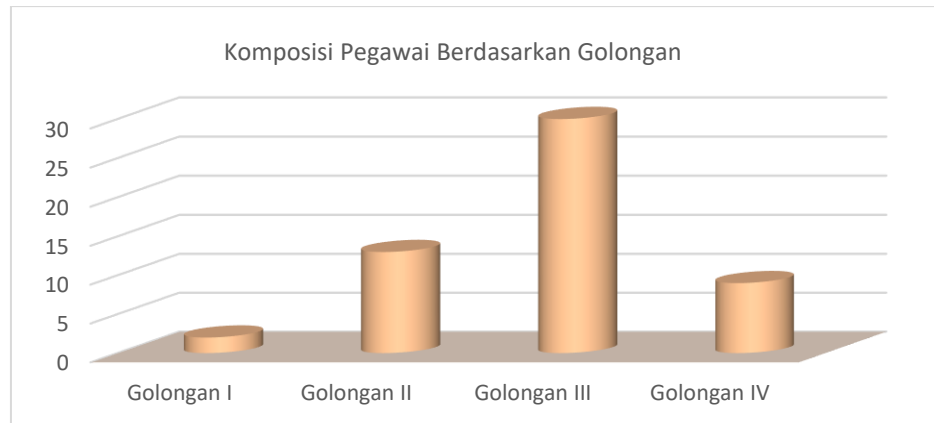


c. Sumber Daya Manusia BBPP Binuang

Pada Pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Binuang didukung oleh 54 orang aparat (Data Per Maret 2020), yang terdiri atas 36 Aparat laki-laki dan 18 Perempuan.

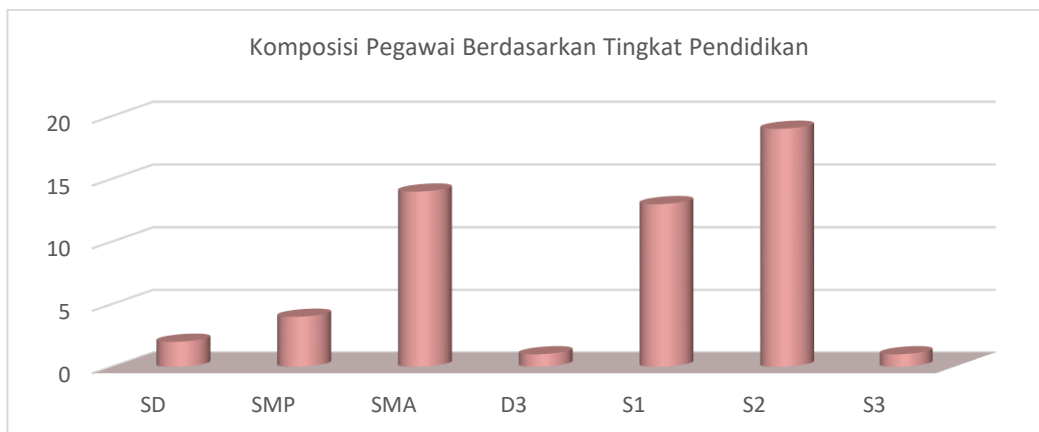
Komposisi pegawai BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut :

- a. Golongan, terdiri atas: golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 30 orang. Golongan IV sebanyak 9 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Per Maret 2020 berdasarkan golongan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan

- b. Tingkat Pendidikan, terdiri atas: S3 (doctoral) sebanyak 1 orang S2 (magister) sebanyak 19 orang, S1 (sarjana) sebanyak 13 orang, D3 (diploma) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 14 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan SD sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BBPP Binnuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

A. Aspek Strategis dan Permasalahan utama (*strategic issued*)

1. Aspek Strategis

a. Sumberdaya Alam

- a) BBPP Binnuang berada di lahan yang telah bersertifikat seluas 11,51 Hektar yang dilengkapi dengan fasilitas instalasi lahan praktek, sehingga sangat representative dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian Teknis Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Tata Guna Air, serta kewirausahaan pertanian.
- b) Instalasi lahan praktek yang tersedia seluas 6,5 hektar dilengkapi dengan sistem irigasi semi teknis yang mengalir sepanjang tahun sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan praktek budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman musiman.
- c) Secara demografi BBPP Binnuang sangat strategis, mudah diakses melalui transportasi darat dan laut yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kalimantan Selatan menjadi pintu masuk untuk semua provinsi di Kalimantan, serta Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru.

b. Sumberdaya Kelembagaan

a) Organisasi dan Tata Kerja

BBPP Binnuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja Eselonering II-b. Dipimpin oleh seorang Kepala Balai.



Eselon III-b dan Eselon IV-a terdiri dari :

- 1) Eselon III Kepala Bagian Umum membawahi tiga eselon IV, masing-masingnya:
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
- 2) Eselon III Kepala Bidang Program membawahi dua Eselon IV, masing-masing:
 - Kepala Seksi Program dan Kerjasama
 - Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan
- 3) Eselon III Kepala Bidang Penyelenggaraan membawahi dua Eselon IV, masing-masing:
 - Kepala Seksi Aparatur
 - Kepala Seksi Non Aparatur

b) Penguatan Kelembagaan Melalui Sertifikasi Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan (ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015)

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), adalah bentuk konsisten manajemen untuk memberikan standard minimal terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian di BBPP Binuang secara konsisten, dan sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu) mulai diterapkan dan diperoleh sertifikasinya sejak tahun 2007. Pada akhir tahun 2016 BBPP Binuang telah mengintegrasikan sistem pelayanan tersebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan, (Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.

Hasil audit merekomendasikan BBPP Binuang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka secara optimal dengan sumber daya yang tersedia untuk :

- Berkomitmen dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan.
- Berperan aktif dalam usaha pelestarian dan perbaikan alam.
- Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Senantiasa memenuhi sasaran mutu dan lingkungan serta persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.



- Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen integrasi (ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015) secara berkelanjutan.
- Mengkomunikasikan system manajemen integrase ini kepada seluruh personil BBPP Binnuang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Lembaga Pelatihan Profesi

Sejak Tahun 2013 BBPP Binnuang mendapat mandat dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pemerintah, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menyelenggarakan pelatihan Profesi khususnya bagi jabatan fungsional RIHP Penyuluh Pertanian, dan pada Tahun 2020 ini dilaksanakan Pelatihan Kompetensi (profesi) yang berkaitan dengan Vokasi Produksi Benih Tanaman Padi, Vokasi Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Vokasi Alsintan, Vokasi Mandor Kebun Kelapa Sawit dan Vokasi Fasilitator Pertanian Organik.

d) Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai Lembaga Pelatihan Profesi BBPP Binnuang telah dapat penugasan untuk melaksanakan mandat Uji Kompetensi khusus bagi pejabat RIHP Penyuluhan Pertanian (Pertanian), yang dilaksanakan mulai tahun 2013.

e) Penumbuhan dan pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Tujuannya adalah pemberian pelayanan sekaligus penyediaan tempat pelatihan/magang pertanian bagi pelaku utama (non apartur) yang tidak mungkin diberikan pelayanan pelatihan/magang secara langsung di BBPP Binnuang, yang tersebar di perdesaan wilayah kerja BBPP Binnuang, dan sejak tahun 2006 BBPP Binnuang sampai saat sekarang telah membina dan mengklasifikasi sebanyak 176 (seratus empat puluh tiga) unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar diwilayah kerja 5 (lima) Provinsi se- Kalimantan, dengan klasifikasi masing-masingnya sbb:



Tabel 1. Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S

NO	PROVINSI	Utama	Madya	Pemula	Penumbuhan	Jumlah
1	KALSEL	0	6	23	11	40
2	KALBAR	3	2	19	17	41
3	KALTRA	0	6	9	1	16
4	KALTENG	1	2	25	1	29
5	KALTIM	15	17	6	12	50
	JUMLAH	19	33	82	42	176

f) Inkubator Usahatani sebagai Unit Pembelajaran Usaha

Tujuan dilaksanakan program Inkubator Usahatani (IUT) adalah merupakan pengembangan peran BBPP Binuang dalam pembinaan usaha kecil bidang pertanian/petani dalam pengembangan usahanya melalui model pembinaan inkubasi (pemeraman)/pendampingan hingga petani tersebut mampu mandiri dalam menghadapi persaingan dalam usahanya.

Unit Inkubasi Usahatani di Balai sekaligus menjadi media pembelajaran kewirausahaan bagi peserta pelatihan untuk dapat belajar pada kondisi nyata kegiatan usaha pertanian, sesuai dengan minat yang akan dikembangkannya.

g) Sumberdaya Manusia

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang memiliki 85 (delapan puluh lima) orang tenaga kepelatihan yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Widyaiswara, Tenaga Pejabat Fungsional Khusus, Pejabat Fungsional Umum, dan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan Kontrak Kerja per tahun.

h) Sumberdaya Teknologi

BBPP Binuang memiliki ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup memadai, mulai dari peralatan pra panen, pengolahan lahan, budidaya tanaman, panen, Pasca Panen, dan sampai kepada pengolahan hasil pertanian, sehingga BBPP Binuang mampu melaksanakan pelatihan pertanian dari hulu sampai hilir. Disamping itu, sarana prasarana yang dimiliki berupa bengkel alsintan dengan petugas teknisi alsintan untuk mengembangkan berbagai alat dan mesin yang tersedia, dapat memberikan peluang pengembangan kreatifitas pertanian, baik melalui modifikasi peralatan yang telah ada, maupun merancang peralatan baru



yang tepat guna dan dibutuhkan oleh petani dengan biaya murah. Pengolahan Limbah Pertanian dan pembuatan pupuk kompos dan cair dari Kotoran ternak itik.

Pendukung fasilitas lainnya, juga diperkuat dengan tersedianya Perpustakaan dan fasilitas Informasi Teknologi melalui Web Site BBPP Binuang, perpustakaan on line, yang ditunjang dengan jaringan WIFI 24 jam.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sampai dengan triwulan I tahun 2020 dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: Quest house, Asrama Peserta, Ruang Makan, Ruang Kelas, Aula, dengan kapasitas asrama sebanyak 138 orang, Poliklinik, Agri Cafe, Inkubator Agribisnis Mart, Jalan Kompleks, Lahan praktek, Saluran Irigasi, Gedung Kantor, Gedung Perpustakaan, Musholla, Sarana Olah Raga, Lapangan Parkir, Green House, Unit Pengolahan Pupuk Organik, Alat dan Mesin Pertanian, Laboratorium Penyuluhan, Alat Pengolahan Hasil Pertanian, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Tiga, Kendaraan Roda Dua dan Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan lain-lain.

2. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

- a) Sebagai UPT BBPP Binuang tidak memiliki kewenangan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga sangat sulit untuk mengikuti pola-pola pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tuntutan dunia kerja industri pertanian.
- b) Belum seluruh instalasi yang ada dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta pelatihan, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- c) Sebaran keberadaan P4S belum merata, sehingga ada beberapa Kabupaten di Provinsi se- Kalimantan (wilayah kerja) masih ada yang belum ada P4S nya,



demikian pula dalam tingkat kemampuan pengelola P4S, masih banyak didominasi klasifikasi Pemula.

- d) Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan sarana prasana Pelatihan
- e) Belum optimalnya peran dan fungsi Inkubator Usahatani dalam mendukung penumbuhan usaha kecil pertanian dan pelatihan berbasis kewirausahaan pertanian
- f) Mandat LDP dan TUK masih fokus pada beberapa bidang keahlian atau vokasi, belum mengarah sepenuhnya ke kompetensi (SSKNI) RIHP lainnya.

b. Aspek Ketenagaan

- a) Terbatasnya kuantitas tenaga kepelatihan
- b) Masih kurangnya motivasi untuk pengembangan diri Tenaga fungsional khususnya Widyaiswara (Kajiwidya, Karya Tulis Ilmiah, Modul, Jurnal, dll)
- c) Belum proposionalnya penempatan tenaga pelatihan berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.

c. Aspek penyelenggaraan

- a) Standar mutu pelayanan Pelatihan telah menggunakan Sistem manajemen Mutu SMM ISO 9001 : 2015, dengan menggunakan instrumen SOP sebagai acuan instruksi kerja pelayanan, tetapi dalam implementasinya belum secara optimal dilaksanakan dan terkoreksi sebagai tindak lanjut perbaikannya, sehingga belum adanya revisi SOP untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan), sesuai Permentan No. 49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan.



d. Aspek Kerjasama

- a) Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya/anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik Pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas kepelatihan.
- b) Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

e. Aspek Pembiayaan

- a) Pembiayaan belum sepenuhnya mengakoodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai.
- b) Terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binuang dalam aspek penyelenggaraan pelatihan dan dukungannya terhadap pengembangan agribisnis, adalah :

1. Kecukupan produksi (swasembada) komoditas strategis padi, jagung, kedelai, sapi, tebu, cabai dan bawang merah serta pengurangan ketergantungan impor.
2. Peningkatan daya saing produk di dalam negeri untuk mengantisipasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
3. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk.
4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
6. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.



7. Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana pelatihan.
8. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan bagi non aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun non aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.
9. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pertanian aparatur maupun non aparatur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan pelatihan vokasi pertanian, meliputi vokasi calon mandor sawit, vokasi fasilitator pertanian organik, vokasi penangkar benih, vokasi sayuran organik dan vokasi yang lain yang mendukung keterampilan petani dalam mengelola usahatani.

Berdasarkan Isu strategis tersebut di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binnuang dalam tahun 2020 akan lebih banyak diarahkan pada pelatihan agribisnis komoditas strategis. Pelatihan seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binnuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun hasil olahan. Prasarana dan sarana pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan agribisnis haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.

Dalam perancangan pelatihan penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelatihan baik aparatur maupun non aparatur. SKK harus disusun oleh BBPP dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi Pembina peserta non aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya pelatihan diperlukan SDM Pertanian kepelatihan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses pelatihan serta tenaga kepelatihan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kepelatihan yang sangat menentukan mutu penyelenggaraan pelatihan perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan



sesuai standar *Management of Training* (MOT) maupun *Training Officer Course* (TOC).

Dalam penyelenggaraan organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terdapat lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strengths*) yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
 - a. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
 - b. BBPP Binuang memiliki sarana pelatihan berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (full-AC).
 - c. BBPP Binuang menyelenggarakan 6 (enam) pelatihan yang telah terakreditasi (lima program pelatihan terakreditasi B dan satu program pelatihan terakreditasi C).
 - d. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
 - e. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP).
 - f. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan dan pelatihan teknis sesuai spesialisasinya.
 - g. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008.
 - h. Triwulan III Tahun 2019 ini BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2015 sudah diperbaharui.
2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :
 - a. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.
 - b. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sesuai standar.



- c. Jumlah Widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
 - d. Kompetensi Widyaiswara belum tersertifikasi.
 - e. Kurikulum dan metodologi pelatihan belum mantap.
 - f. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
 - g. Perubahan atau revisi SOP tidak dilaksanakan walaupun nomenklatur kinerja sudah berubah.
 - h. Budaya Kerja (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin) belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
 - i. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelatihan belum prima.
3. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (*opportunities*) dalam kegiatan yaitu:
- a. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binuang.
 - b. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binuang dalam melaksanakan pelatihan.
 - c. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan BBPP Binuang.
 - d. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.
4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan di BBPP Binuang.
 - b. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan.
 - c. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kepelatihan khususnya Widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.

BBPP Binuang sebagai lembaga Pelatihan, untuk menghasilkan SDM pertanian yang kompeten dan berkarakter, maka perlunya standarisasi lembaga,



sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/J/01/12 tanggal 9 Januari 2012, yang pada gilirannya mampu bersaing dengan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan dikenal di tingkat internasional. Dan agar para penyelenggaranya (Widyaiswara dan tenaga kepelatihan lainnya) menjadi pengelola pelatihan yang berdaya saing dan bertaraf internasional, maka dibutuhkan Widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh Widyaiswara meliputi: (i) kompetensi pengelolaan pembelajaran; (ii) kompetensi kepribadian; (iii) kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive. Sedangkan penetapan spesialisasi Widyaiswara mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Standardisasi Tenaga Kepelatihan Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11, dengan kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis spesialisasi yaitu : (i) Budidaya Tanaman; (ii) Pengelolaan Limbah Tanaman; (iii) Hama dan Penyakit Tanaman; (iv) Konservasi Lahan dan Klimatologi; (v) Mekanisasi Pertanian; (vi) Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian; (vii) Sosial Ekonomi Pertanian; dan (viii) Penyuluhan Pertanian. Sampai saat ini Widyaiswara dan tenaga kepelatihan yang ada di BBPP Binuang sepenuhnya belum didukung oleh Widyaiswara dengan spesialisasi yang diperlukan.

Isu Otonomi Daerah masih perlu menjadi pertimbangan, bahwa otonomi daerah adalah otoritas yang dimiliki daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan didaerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyatnya, demikian pula terhadap pembangunan sector pertanian, bahwa hampir setiap Kabupaten/kota memiliki program sendiri dalam rencana pembangunannya.

Tugas kita adalah mensinkronkan (linkage) program antara program pembangunan pertanian nasional dengan program yang diusung oleh masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan Fokus wilayah berbasis program pembangunan pusat dan daerah.



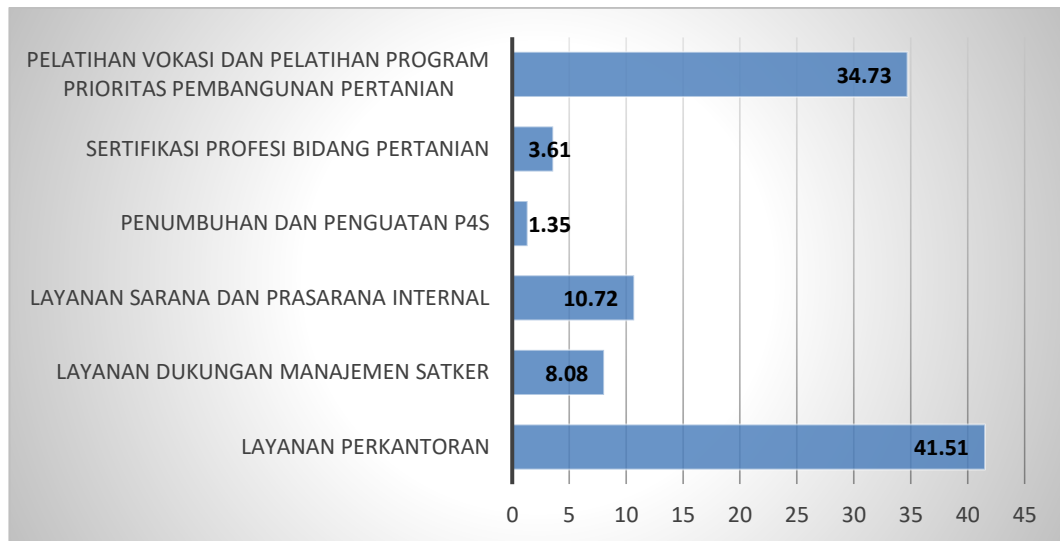
D. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang tersedia pada pagu APBN BBPP Binuang TA 2020 adalah sebesar Rp 18.030.317.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Anggaran BBPP Binuang Tahun 2020

No	Uraian	Pagu (Rp)	Persentase
1	1810.001 Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	6.261.694.000	34,73%
2	1810.002 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	650.841.000	3,61%
3	1810.003 Penumbuhan dan Penguatan P4S (Lembaga)	243.214.000	1,35%
4	1810.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead) (Bulan)	1.932.986.000	10,72%
5	1810.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.456.820.000	8,08%
6	1810.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	7.484.762.000	41,51%
	Total	18.030.317.000	100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase pagu anggaran BBPP Binuang tertinggi sampai terendah adalah pada kegiatan Layanan perkantoran yaitu 41,51 %, Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian 36,00 %, Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead) 10,72 %, Layanan Dukungan Manajemen Satker 8,08 %, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian 3,61 % dan Penumbuhan dan Penguatan P4S 1,35 %. Persentase pagu anggaran BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Pagu Anggaran BBPP Binnuang

Selama triwulan I Tahun 2020 berjalan dari total pagu awal Rp. 18.030.317.000,- belum ada revisi anggaran BBPP Binnuang sehingga tidak ada perubahan pagu dan perubahan output.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BBPP Binuang tahun 2020–2024 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis tahun 2020–2024, program kegiatan dan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka mengembangkan tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik, pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang menetapkan visi 2020 - 2024 dengan mengacu kepada visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka visi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) adalah: *“Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing” mendukung Job Creator dan Job Seeker”*.

2. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelatihan.
- b. Mengembangkan ketenagaan diklat.
- c. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat.
- d. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
- e. Menyiapkan pelatihan berbasis Job Ceator dan Job Seeker.

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- b. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;



- c. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian
- d. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Penguatan dan Pengembangan Penyuluhan/Pedampingan Petani dan Korperasi Petani

4. Sasaran Strategis

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang pada tahun 2020–2024 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- a) Terwujudnya kelembagaan BBPP Binuang yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
- b) Terwujudnya 20 unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional.
- c) Terwujudnya pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
- d) Terwujudnya inkubator Usahatani di BBPP Binuang.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Peningkatan Ketenagaan kediklatan yang profesional dan berkarakter

- a) Meningkatkan kompetensi 88 orang (kumulatif) Widyaiswara BBPP Binuang sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
- b) Menambah 15 orang Widyaiswara melalui rekrutmen baru dan alih fungsi tugas sesuai standar kebutuhan dan kekhasan fungsi BBPP Binuang;
- c) Meningkatnya profesionalisme 350 orang tenaga kediklatan pada BBPP Binuang;
- e) Meningkatnya kompetensi 150 orang instruktur dan 210 orang pengelola P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

3. Berkembangnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;



- b) Meningkatnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
- c) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar Negeri dengan pihak terkait.

5. Kebijakan Strategis Tahun 2020–2024

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Badan PPSDMP dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, adalah:

1. Penguatan pendidikan vokasi pertanian untuk menghasilkan Job Creator dan Job Seeker.
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi pertanian untuk menghasilkan *Job Creator* dan *Job Seeker*
3. Penguatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
4. Penguatan system manajemen peningkatan kompetensi ASN dan Pekerja bidang pertanian untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDM Pertanian terkait dengan kegiatan Pelatihan Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Pertanian difokuskan pada ***Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Pelatihan untuk Mendukung menghasilkan Job Creator dan Job Seeker***, yaitu:

1. Membangun eksistensi dan kemandirian lembaga melalui program berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi;
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sarana-Prasarana UPT Pelatihan Menuju Badan Layanan Usaha (BLU);
3. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan berkarakter;
4. Diklat Berbasis Standar Kompetensi Kerja yang berdaya saing;
5. Pengembangan model dan pola diklat yang berorientasi pasar, bio-industri berkelanjutan, berbasis kawasan, diklat di tempat kerja, berbasis kreatifitas, dan lain-lain;
6. Fasilitasi P4S sebagai lembaga diklat swadaya;



7. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

B. Strategi

Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan;
2. Peningkatan prasarana dan sarana UPT pelatihan pertanian.
3. Pemberdayaan P4S sebagai penyelenggara diklat non-aparatur dan TUK.
4. Peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan;
5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

6. Program Kegiatan

Program Badan PPSDMP Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, yang dijabarkan pada Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Puslatan merumuskan kegiatan dan indikator kedalam 4 (empat) pilar yaitu : (i) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (ii) Kelembagaan pelatihan pertanian; (iii) Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; (iv) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan. Balai Besar Pelatihan Pertanian sebagai UPT Pelatihan Pusat mempunyai program yang sama dengan Puslatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi eselon I .

IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang.
- b. Penurunan rata rata *Competency Gap Index* peserta pelatihan pertanian.
- c. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang.
- d. Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015).

7. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program Tahun 2020 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :



- a. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, terdiri dari program :
 - Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian
 - Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
 - Penumbuhan dan Penguatan P4S.
- b. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian.
- c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- d. Pemantapan pendidikan pertanian.

B. Perjanjian Kinerja

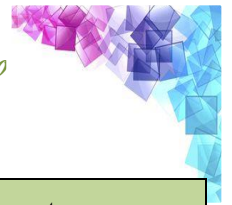
Perencanaan Kinerja dituangkan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA ditertibkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Unit Eselon I : BPPSDMP

Tahun : 2020

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	
1	2	3	
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	60	%
Reformasi birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan pada prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang	94,45	Nilai



Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	
1	2	3	
Terkelolanya anggaran BBPP Binuang yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi reuiu laporan keuangan BBPP Binuang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektoral Jenderal	80	%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2020. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2020 - 2024.

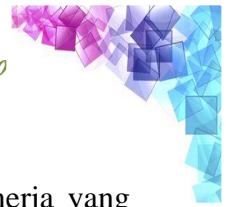
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja triwulan I tahun 2020 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator*.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2020 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi : capaian kinerja tahun 2020, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

1. Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2020

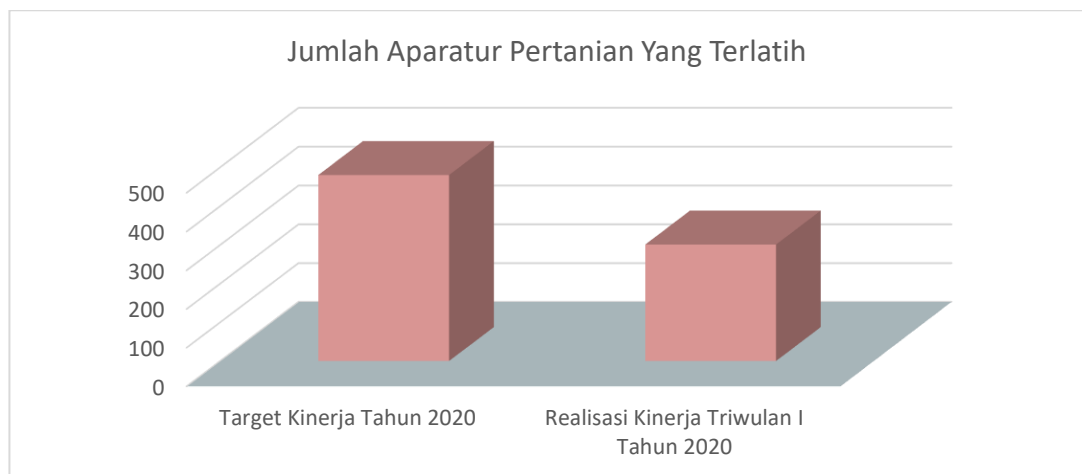
Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Tahun Anggaran : 2020

(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

Indikator : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

a. Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Target kinerja BBPP Binuang tahun 2020 untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang terlatih adalah 480 orang dengan rincian target. Untuk triwulan I tahun 2020 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun triwulan I tahun 2020 sebesar 301 orang dari atau sebesar (62,71%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 untuk indikator jumlah aparatur pertanian yang terlatih :



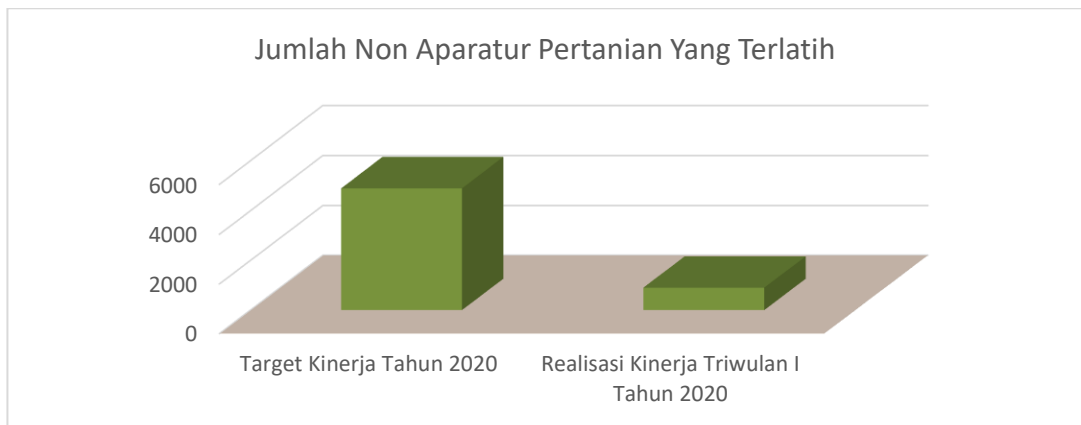
Gambar 5. Persentase Indikator Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih



Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang 2020. Persentase jumlah aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar **62,7%** dari target yang telah direncanakan.

b. Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Target kinerja BBPP Binuang tahun 2020 untuk indikator kinerja jumlah non aparatur pertanian yang terlatih adalah 4.413 orang dengan. Untuk tahun 2020 realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur tahun triwulan I tahun 2020 sebesar 902 orang dari atau sebesar (20,44%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 untuk indikator jumlah non aparatur pertanian yang terlatih :



Gambar 6. Persentase Indikator Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang tahun 2020. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 20,44 % dari target yang telah direncanakan.

c. Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Disertifikasi

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi tahun 2020 belum dilaksanakan di triwulan I. Meski demikian Sertifikasi yang dilakukan Sertifikasi Operator Asintan Pra Panen Non Aparatur Pertanian, dengan anggaran dari Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) BPPSDMP sedang dilakukan oleh BBPP Binuang, dengan jumlah peserta 31 orang.

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian tahun sampai dengan triwulan I tahun 2020 telah menumbuh kembangkan



P4S sebanyak 176 atau terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah 33 lembaga, yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan (Kalimantan selatan, Kalimantan barat, Kalimantan utara, Kalimantan tengah dan Kalimantan timur).

Secara keseluruhan realisasi kinerja BBPP Binnuang dibandingkan dengan target sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Kinerja BBPP Binnuang Dibandingkan Dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Persentase
	2020	Triwulan I 2020	
Jumlah aparatur pertanian yang terlatih	480	301	62,71%
Jumlah non aparatur pertanian yang terlatih	4.413	902	20,44%
Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang disertifikasi	-	-	-
Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian	-	-	-

e. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPP Binnuang triwulan I Tahun 2020 Dengan Target Tahun 2020

Program Tahun 2020 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah Pemantapan sistem pelatihan pertanian yang terdiri Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, serta Penumbuhan dan Penguatan P4S

Tabel 5. Target dan realisasi Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian

Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Pelatihan Teknis	932	212	22,75%
Pelatihan Fungsional	90	30	33,33%
Pelatihan Bisnis Kewirausahaan	60		0%
Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30		0%
Pelatihan Komoditas Perkebunan 3 Hari	270	120	44,44%



Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Pelatihan Komoditas Tanaman Pangan 3 Hari	2.970	420	14,14%
Pelatihan Alsintan 3 Hari	91	61	67,03%
Pelatihan Komoditas Hortikultura 3 Hari	450	180	40%

Sedangkan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dan Penumbuhan dan Penguatan P4S belum dilakukan di triwulan I tahun 2020.

(B) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima

Indikator : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penlian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk triwulan I tahun 2020 belum dihitung realisasi capainnya.

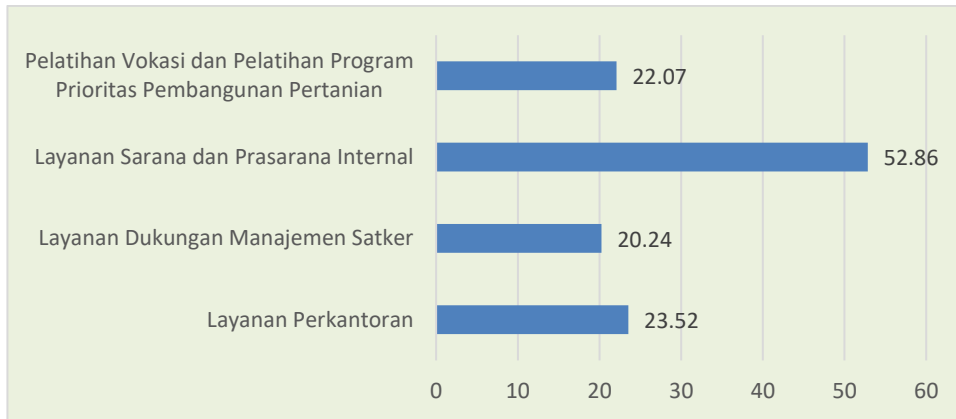
(C) Terkelolanya Anggaran BBPP Binuang Yang Akuntabel Dan Berkualitas

a. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 18.030.317.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal triwulan I tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.347.512.799,- atau 35,21%.

Tabel 5. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	1810.001 Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	6.261.694.000	1.382.258.680	22,07%
2	1810.002 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	650.841.000	-	-
3	1810.003 Penumbuhan dan Penguatan P4S (Lembaga)	243.214.000	-	-
4	1810.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead) (Bulan)	1.932.986.000	1.021.835.000	52,86%
5	1810.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.456.820.000	294.897.890	20,24%
6	1810.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	7.484.762.000	1.762.067.741	23,52%
		18.030.317.000	6.347.512.799	35,21%
Rata – Rata				23,74%



Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2020

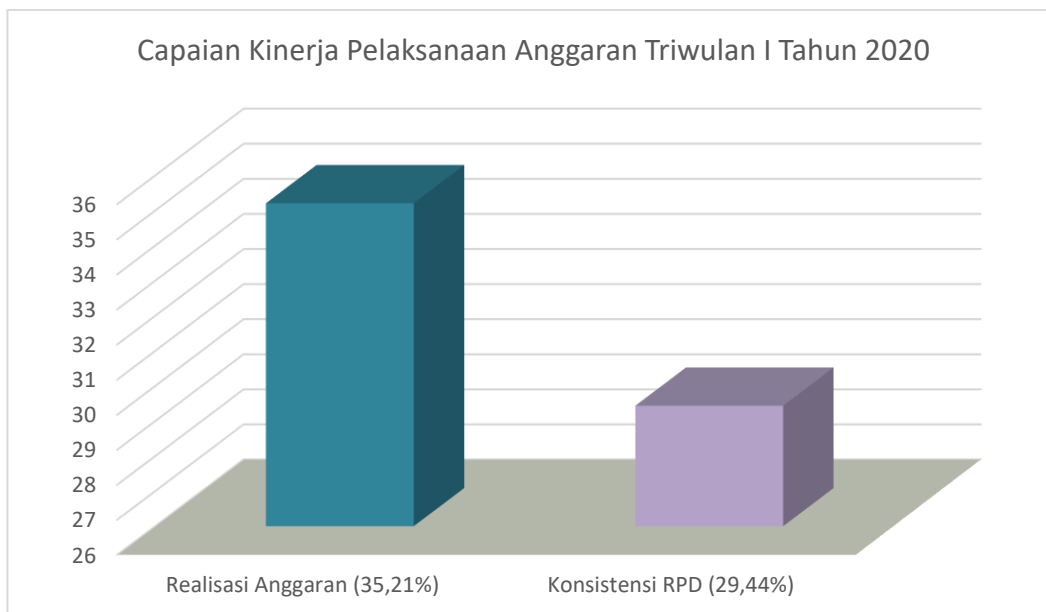
Program Penumbuhan dan Penguatan P4S dan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian belum dilaksanakan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiennya adalah penggunaannya sumber daya anggaran. Selain jumlah sumberdaya manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja.

Capaian realisasi anggaran BBPP Binuang pada tahun 2020 sebesar Rp. 18.030.317.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 6.347.512.799,- (35,21%), jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPP Binuang triwulan I tahun 2020 pada gambar berikut :



Gambar 8. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Binuang

Berdasarkan Gambar 8 pencapaian nilai kinerja BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 termasuk kedalam kategori BAIK. Persentase capaian kinerja BBPP Binuang tahun 2020 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 35,21%.
2. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD adalah Rp 15.052.411 dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 4.432.286, sebesar 29,44%.

b. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Ruang lingkup manajemen sarana prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan asset tanah dan bangunan kantor di lingkungan BBPP Binuang menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaannya maupun efisiensi dalam pemanfaatannya. Untuk melihat efisiensi tingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut :



Sarana BBPP Binuang terdiri dari barang bergerak dan barang tak bergerak. Barang tak bergerak meliputi bangunan kantor, bangunan asrama, ruangan aula dan kelas, laboratorium, bangunan rumah makan, rumah dinas dan lain-lain.

Bangunan asrama terdiri dari 4 bangunan, yaitu asrama mundar, asrama pampakin, asrama kasturi 1 dan asrama kasturi 2. Bangunan asrama dimanfaatkan/digunakan jikalau terdapat pelatihan/pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang, selain asrama terdapat *quest house* yang disiapkan untuk tamu atau narasumber yang akan menginap di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Daftar penggunaan asrama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Kapasitas Asrama Tahun 2020

No	Sarana/Fasilitas	Jumlah Kamar (Buah)	Daya Tampung (Org)
1	Asrama Mundar	15	30
2	Asrama Pampakin	15	30
3	Asrama Kasturi 1	15	30
4	Asrama Kasturi 2	15	30
5	Guest House Rambai	4	4
6	Guest House Maritam	4	4
	Jumlah	68	128

Okupansi BBPP Binuang triwulan I tahun 2020:

Man days (Jumlah orang x Hari latihan) x 100%

Jumlah hari 1 tahun x kapasitas balai

Jumlah peserta berdasarkan DIPA = 1.023 orang

Jumlah peserta dari kegiatan kerjasama =

Total jumlah peserta = 1.023 orang

Ket : orang peserta regular, pelatihannya dilaksanakan di provinsi/kabupaten

Hasil perhitungan okupansi kapasitas adalah

$[(1.023 \times 7) : (334 \times 120)] \times 100\% = 17,55\%$

Untuk melihat efisiensi pemanfaatan asrama beserta fasilitas pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut, kapasitas asrama BBPP Binuang selama 1 tahun adalah 68.136 orang, namun pemakaian asrama selama



triwulan I tahun 2020 adalah 1.023, artinya hanya 17,55% pemakaian asrama untuk pelatihan.

Kondisi tidak seimbangya antara jumlah asrama dan pemakaian asrama selama setahun disebabkan oleh pelatihan pada triwulan I tahun 2020 lebih banyak dilaksanakan di provinsi lain atau di kabupaten (pelatihan tematik dan bimtek), untuk itu dilakukan beberapa upaya diantaranya bekerjasama dengan dinas pertanian, perkebunan, bakorluh, BP4K dan lain-lain di wilayah Kalimantan maupun di luar Kalimantan dalam hal kerjasama pelatihan.

C. Kinerja Lainnya

Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelatihan pertanian dengan indikator *competency gap index* peserta pelatihan pertanian yang mencapai realisasi sebesar 19,83% dari target 20.00%, (nilai CGI semakin kecil semakin baik) persentasenya mencapai 99,15% (Kategori sangat berhasil). Berdasarkan 4 (empat) kegiatan indikator kinerja, yakni (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binnuang, (2) Penurunan rata – rata *competency gap index* peserta pelatihan pertanian, (3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binnuang yang terjadi berulang, (4) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015, Maka pencapaian masing-masing kegiatan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binnuang = 3,89 (skala likert) dari target 4, persentase 97,25 % (kategori berhasil).
- 2) Penurunan rata – rata *competency gap index* peserta pelatihan pertanian = 19,83 % dari target 20.00%, persentase 99,15% (kategori sangat berhasil).
- 3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binnuang yang terjadi berulang = belum ada pemeriksaan BPK.
- 4) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015 = belum ada pemeriksaan itjen.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binnuang triwulan I tahun 2020 dari target realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binnuang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan



kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai

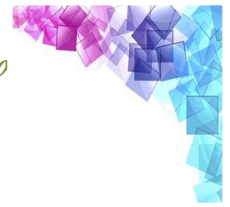


responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pelayanan , yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada triwulan I tahun 2020 yang diperoleh dari 9 Indikator Unsur pelayanan, diperoleh nilai rata-rata :

1. Persyaratan Pelayanan	:	3,84
2. Prosedur Pelayanan	:	3,91
3. Waktu Penyesuaian Pelayanan	:	3,88
4. Biaya/ Tarif Pelayanan	:	4
5. Kesesuaian Produk Pelayanan	:	3,77
6. Kemampuan Petugas Pelayanan	:	3,88
7. Kecepatan pelayanan	:	3,91
8. Kualitas Sarana dan Prasarana	:	4



9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan : 3,89

Melihat hasil tabulasi dari 9 Unsur Pelayanan tersebut diperoleh Nilai Rata rata Tertimbang per unsur adalah : 3,89 (kategori mutu pelayanan sangat baik) Dan Nilai SKM Unit Pelayanan : 97,49 (A = Sangat Baik).

Dari hasil tabulasi tersebut dapat dilihat bahwa dengan nilai SKM 97,49 atau 3,89 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan adalah *Sangat Baik*. Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur *Kualitas Sarana dan Prasarana dan Biaya/ Tarif Pelayanan* (4,00) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah unsur *Kesesuaian Produk Pelayanan* (3,77). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Kualitas Sarana dan Prasarana dan Biaya/Tarif Pelayanan, sedangkan Kesesuaian Produk Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Secara keseluruhan nilai SKM 3,89 termasuk kategori pelayanan sangat baik.

b. Competency Gap Index Peserta Pelatihan Pertanian

Competency Gap Index (CGI) adalah kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan yang dimiliki individu tersebut.

Penilaian CGI dapat menggunakan beberapa alternatif sebagai berikut Assesment center, Wawancara perilaku (berbasis kompetensi), Metode 360 derajat dan metode alternatif lainnya. Hasil penilaian CGI Diperoleh dari selisih standar kompetensi kerja dengan nilai kompetensi individu. Nilai CGI yang diperoleh adalah 19,83% dari target yang ditetapkan sebesar 20.00%, lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai CGI sampai dengan akhir tahun telah mencapai/melebihi target. Nilai CGI diperoleh < 20.00% lebih baik karena kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang ditetapkan tidak terlalu besar.

c. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan Itjen atas Implementasi SAKIP Yang Terjadi Berulang (5 Aspek SAKIP sesuai Permentan RB 12 Tahun 2015)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada



masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan kinerja
2. Penilaian terhadap pengukuran kinerja
3. Penilaian terhadap pelaporan kinerja
4. Penilaian terhadap evaluasi internal
5. Penilaian terhadap capaian kinerja

Sampai triwulan I tahun 2020, belum dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di BBPP Binuang

d. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan BPK atas Temuan Itjen Atas Pengelolaan Keuangan BBPP Binuang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan



tindak pidana korupsi. Di tahun 2020 BPK belum melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan di BBPP Binuang untuk triwulan I tahun 2020.

e. Penerimaan PNBP

BBPP Binuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang di pungut melalui bendahara penerima. PNBP Meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional dimana pada tahun 2020, Penerimaan Umum Meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL ; penerimaan kembali belanja lainnya TAYL ; pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

Pendapatan Fungsional meliputi: Pendapatan Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan; pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan; pendapatan jasa lainnya. Target penerimaan PNBP sebesar Rp. 71.233.600,- dan telah diperoleh sebesar Rp. 14.296.700,- Capaian kinerja penerimaan PNBP (20,07%) triwulan I tahun 2020 sebagaimana gambar berikut :

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

No	Tahun	Target	Realisasi Triwulan I 2020	Persentase
1	2020	Rp. 71.233.600,-	14.296.700	20,07%

Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan bulan triwulan I tahun 2020 sebesar 20,07% atau senilai Rp. 14.296.700,-

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

- a. Pandemi corona sangat mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian, terutama menurunkan intensitas pertemuan dan pelatihan. Meskipun demikian dengan perubahan pola pelatihan dan komunikasi secara online dapat digunakan untuk sementara di tengah keterbatasan interkasi dan komunikasi di lapangan.



- b. Untuk menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah, dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat, maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pertanian wilayah, dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adanya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta, dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.
- c. Pelaksanaan pelatihan tematik tidak dilaksanakan di BBPP Binuang sehingga memerlukan persiapan dan koordinasi yang lebih intens ke pihak pelaksana pelatihan tematik di daerah khususnya terkait persiapan pelaksanaan evaluasi pelatihan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi nilai CGI (*Competency Gap Index*).
- d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah memenuhi target Tahun 2020, namun tetap diperlukan peningkatan terhadap pelayanan khususnya pada kejelasan pelaksana pelayanan, kemampuan pelaksana pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kewajaran biaya pelayanan.



BAB IV PENUTUP

Kami berharap pandemi corona segera berlalu dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian dapat berjalan normal kembali. BBPP Binuang mempunyai mandat bersifat regional dan nasional, yang memiliki kekhasan bidang pertanian. Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi BBPP Binuang untuk kurun waktu triwulan I tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 dalam pencapaian meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja jumlah aparatur terlatih triwulan I tahun 2020 sebesar (62,71%). Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur terlatih sebesar sebesar (20,44%). Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian triwulan I tahun 2020 telah menumbuh kembangkan P4S sebanyak 176 atau terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah 33 lembaga. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk triwulan I tahun 2020 belum dihitung realisasi pencapaiannya.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang berdasarkan alokasi anggaran tahun 2020, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 18.030.317.000,- Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan triwulan I tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.347.512.799,- atau 35,21%. Rincian persentase realisasi anggaran BBPP Binuang tahun 2020 yaitu Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian 22,07%, Layanan Sarana dan Prasarana Internal 52,86%, Layanan Dukungan Manajemen Satker 20,24%, Layanan Perkantoran 23,52%. Sedangkan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dan Penumbuhan dan Penguatan P4S belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang triwulan I tahun 2020 untuk pencapaian kinerja lainnya adalah : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang = 3,89 (kategori mutu pelayanan sangat baik) Dan Nilai SKM Unit Pelayanan : 97,49 (A = Sangat Baik) dari target 4, persentase 102,5% (kategori sangat



baik); (2) Penurunan rata – rata *competency gap index* peserta pelatihan pertanian = 19,83 % dari target 20.00%, persentase 99,15% (kategori sangat berhasil).; (3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang = belum dilakukan pemeriksaan di triwulan I tahun 2020; (4) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP = belum dilakukan pemeriksaan di triwulan I tahun 2020; (5) Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan bulan triwulan I tahun 2020 sebesar 20,07%.

Demikian Laporan ini disusun sebagai instrument monitoring kinerja. Kami berharap laporan kinerja tersebut dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.